

TUGAS AKHIR
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET DI KECAMATAN TEMBILAHAN PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

DISUSUN OLEH:

LISMANIAR
NIM.01076203515



PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013

ABSTRAK

“Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”.

Oleh:

LISMANIAR

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung pada bulan Februari s/d Mei 2013. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan data skundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan.

Sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini menggunakan 2 sistem yaitu Official Assesstment System dan Self Assessment System. Sedangkan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet disini meliputi: Pendaftaran dan Pendataan, Pelaporan, Pembayaran dan Penagihan dan, Angsuran dan Penundaan Pembayaran.

Kata Kunci : “Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur ats kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : **“Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tembilahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”**. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan besar kita yakni Muhammad SAW sebagai Rasul dan Nabi bagi umat Islam, risalah yang bawa membedakan antara yang benar dan yang salah.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Terimakasih yang tulus kepada :

1. Orang Tuaku yang tercinta dan tersayang Bapak Syafriadi Lazim dan Ibu Rahimah. Tiada daya upaya jika tanpa dukungan serta restu mereka sehingga penulis mampu bertahan dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT Mengasihi dan menyayangi mereka dan penulis menjadi kebanggaan mereka dan selalu berbakti kepada mereka .
2. Abang dan Adik,teman terdekat penulis yakni Zian Priansyah dan Azmil, Yuni, Inong, Hairiah, Sila, Sanah, Tina, yang mana berkat

dorongan dan motifasi mereka penulis bisa menjadi orang yang mandiri dalam segala sesuatu.

3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Almasri M.Si, selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dengan keramahan serta kerendahan hati yang telah memberikan masukan, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Mahmuzar, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Administrasi Perpajakan yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk awal kepada penulis dalam memulai penulisan tugas akhir ini.
7. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si, selaku sekretaris jurusan Prodi Administrasi Perpajakan yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini
8. Bapak serta Ibu Dosen Sehingga berkatnyalah penulis menjadi orang yang mempunyai wawasan dan ilmu yang bermanfaat.
9. Bapak/Ibu pimpinan perpustakaan beserta staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana telah memberikan

literatur, sehingga penulis merasa terbantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Bapak kepala Dinas Pendapatan Daerah serta Staf pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mana telah membantu penulis dalam memperoleh data-data serta informasi yang berkaitan dengan tugas akhir ini.
11. Buat teman-teman satu angkatan Administrasi Perpajakan tahun 2010, Nita, Tini, Seny, Zakia, Rika, Yesi, Muslim, Amin, Ade, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Dan tidak terlupakan yang selalu ada dihati penulis yakni Syahrin. Karena berkat bantuan dan motivasinya penulis bisa menjadi orang yang mandiri dalam segala hal.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, dan terima kasih atas segala bantuannya, semoga apa yang semua kita lakukan diridhoi oleh Allah SWT. Amien.....

Pekanbaru, 2013

Penulis

LISMANIAR
NIM.01076203515

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN	
 DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	10
2.1 Sejarah Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten	
Indragiri Hilir	10
2.2 Visi Dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah	
Kabupaten Indragiri Hilir	12
2.3 Uraian Tugas	12
2.4 Struktur Organisasi	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	18
3.1 Tinjauan Teori	18
3.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum	18
3.1.2 Fungsi Pajak	20

3.1.3	Jenis Pajak	20
3.1.4	Cara Pemungutan Pajak	21
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak	22
3.1.6	Pembagian Pajak	23
3.1.7	Asas Pemungutan Pajak	25
3.1.8	Syarat Pemungutan Pajak	26
3.1.9	Pengertian Pajak Daerah	27
3.1.10	Jenis Pajak Daerah	28
3.1.11	Jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir	28
3.1.12	Pengertian Pajak Sarang Burung Walet	29
3.1.13	Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet	30
3.1.14	Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet ..	30
3.1.15	Tarif Pajak Sarang Burung Walet	30
3.1.16	Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam	31
3.2	Tinjauan Praktek	33
3.2.1	Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	33
3.2.2	Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	34
3.2.3	Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	38
3.2.4	Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet	41

3.2.5	Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	43
3.2.6	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet	44
3.2.7	Ketentuan Pidana Pajak Sarang Burung Walet..	45
BAB IV	PENUTUP	46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber pemungutan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipicu untuk dapat berkreasi mencari sumber pemungutan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber pemungutan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pemungutan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber pemungutan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemungutan daerah, bahkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 lahir sebagai

upaya untuk mengubah system perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya. Dalam perkembangan penerapan Undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan berkembangnya situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah pengusahaan/penangkaran Sarang Burung Walet. Burung walet yang bersarang dipinggur-pinggir sungai, goa-goa alam/buatan, rumah-rumah penduduk, ruko dan bangunan lainnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pada umumnya pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tidak difokuskan pada suatu wilayah tertentu atau belum dilakukan penataan khusus terhadap lokasi penangkaran sarang burung walet, tetapi sekarang penangkaran sarang burung walet telah dilakukan penataan khusus seperti di rumah-rumah penduduk/ruko.

Adapun jumlah pengusaha burung walet yang ada di Kecamatan Tembilahan Kabupten Indragiri Hilir ini pada tahun 2010 berjumlah 189 buah yang tersebar di 4 Kelurahan dan 1 Desa dan jumlah keseluruhan wajib pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan berjumlah 250 wajib pajak. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah penangkar sarang burung walet se-

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel I.1. Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet Se-Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2008 – 2010

No	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet Kelurahan dan Desa	2008	2009	2010
1	Kelurahan Tembilahan Kota	117	174	173
2	Kelurahan Tembilahan Hilir	-	5	10
3	Kelurahan Pekan Arba	-	1	5
4	Kelurahan Sei Perak	-	-	-
5	Kelurahan Sei Jepun	-	-	-
6	Desa Amban Sari	-	1	1
	Jumlah	117	181	189

Sumber : Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi yang ada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari penangkaran burung walet dinilai cukup potensial. Dimana setiap kelurahan yang ada, masing-masing memiliki penangkaran sarang burung walet. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari sarang burung walet. Dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel I.2. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2008	117.865.000,00	120.765.000,00	102,46
2	2009	228.595.000,00	231.465.000,00	101,25
3	2010	227.720.000,00	223.260.000,00	98,04
4	2011	253.835.000,00	77.300.000,00	30,45
5	2012	940.700.000,00	123.429.500,00	13,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak sarang burung walet pada tahun 2008 penerimaanya sangat bagus yang mana mencapai 102,46 %, dan pada tahun 2009-2012 penerimaan terhadap pajak sarang burung walet mengalami penurunan terus setiap tahunnya hingga mencapai 13,12 % pada tahun 2012, hal ini kemungkinan terjadi akibat sistem dan prosedur pemungutan terhadap pajak sarang burung walet yang belum diketahui oleh para penangkaran burung walet tersebut. Dibawah ini terdapat gejala yang dinilai mempengaruhi standarisasi pemungutan pajak sarang burung walet tersebut diantaranya :

1. Dalam proses pembayaran pajak tersebut, pengusaha mengakui belum mengetahui system penetapan pembayaran pajak. Sehingga merasa tidak memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet.
2. Kurangya sosialisialisasi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tentang Peraturan Daerah ini pada pengusaha walet.

Kemudian kepemilikan tempat pengusahaan sarang burung walet sebahagian berdomisili diluar Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat menimbulkan kesuliatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Yang mana secara geografis, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak sungai dan dikenal dengan

negeri seribu parit sehingga banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet tersebut.

Berdasarkan uraian ringkasan diatas maka penulis ingin mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya menjadi suatu karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis dengan judul: **“SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN TEMBILAHAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu: “Bagaimanakah Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir”?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Dinas Pendapatan Daerah khususnya mengenai Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
2. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Hang Tuah No.04 Tembilahan.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari dan akan direncanakan selesai pada bulan Mei 2013.

1.4.3. Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder umumnya bisa berupa Dokumen, Arsip, Perumusan dan catatan lain yang diperlukan.

1.4.4. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
2. Interview (Wawancara), yaitu penulis melakukan wawancara langsung yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan

dan Keberatan tentang bagaimana Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

1.4.5. Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, yang meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang Pengertian Pajak Secara Umum, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, Cara Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pembagian Pajak, Asas Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Jenis Pajak Daerah, Jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Pengertian Pajak Sarang Burung Walet, Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet, Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet, Tarif Pajak Sarang Burung Walet, Pengertian Pajak berdasarkan Pandangan Islam, Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet, Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet,

Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet,
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet,
Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dan Ketentuan
Pidana Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang
kesimpulan dan saran yang membangun bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

2.1. Sejarah Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) di dirikan pada tahun 1965, akan tetapi pada masa itu Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan bagian keuangan dan Dinas Khas Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Tingkat II Indragiri Hilir. Dengan kemajuan perkembangan dan

Tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir yang diperkirakan pada tahun 1977 namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati yang terletak di jalan gajah mada nomor 01 Tembilahan Kota.

Dengan memiliki kantor tersendiri otomatis terpisah pula tenaga kerja pelaksanaan dan pimpinan Kantor, dan pada saat itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mulai berdiri sendiri dibawah Pimpinan Bapak H.Usman Fu'ad.

Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan juli 2005 Dinas Pendapatan Daerah berpindah ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di gedung Inhil Business Center yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil Business Center tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah. Di gedung Inhil Business

Center Dinas Pendapatan Daerah satu atap dengan Bank Perkreditan Rakyat, Kantor Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD).

Gedung Inhil Business Center tersebut diresmikan pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun nama – nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. H. Usman Fu'ad
2. Yhuda Yahya BA
3. Drs. Alibun Siregar
4. Drs. Jailani Sabrah
5. Drs. Nazarudin Ahmad
6. Drs. Indra Bangsawan
7. Drs. Said Saripuddin
8. Drs. Husni Hasan
9. H. Edy Syafwannur, SE. MP
10. Drs. H .A. Rasyid HZ
11. Fajar Husin, SH. MH (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sekarang)

2.2. Visi dan Misi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang optimal. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Meningkatkan kinerja aparatur dinas pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi penerimaan pendapatan daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

2.3. Uraian Tugas

Adapun aktifitas Dinas Pendapatan Daerah yang disusun dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 62/DPD-TU/IV/2005 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Memimpin kegiatan Dinas, baik Administratif maupun Operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tugas.

2. Bidang Sekretariat

- a. Penyusun program dan kegiatan kesekretariatan
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta perencanaan dan pengendalian
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
- g. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja dinas, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Bidang Dana Perimbangan

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan Lingkup Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan Lingkup Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Lingkup Pembukuan dan Pelaporan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan lingkup pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
 - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan lingkup pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, penyelesaian keberatan atas penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pendataan, Penetapan dan Keberatan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

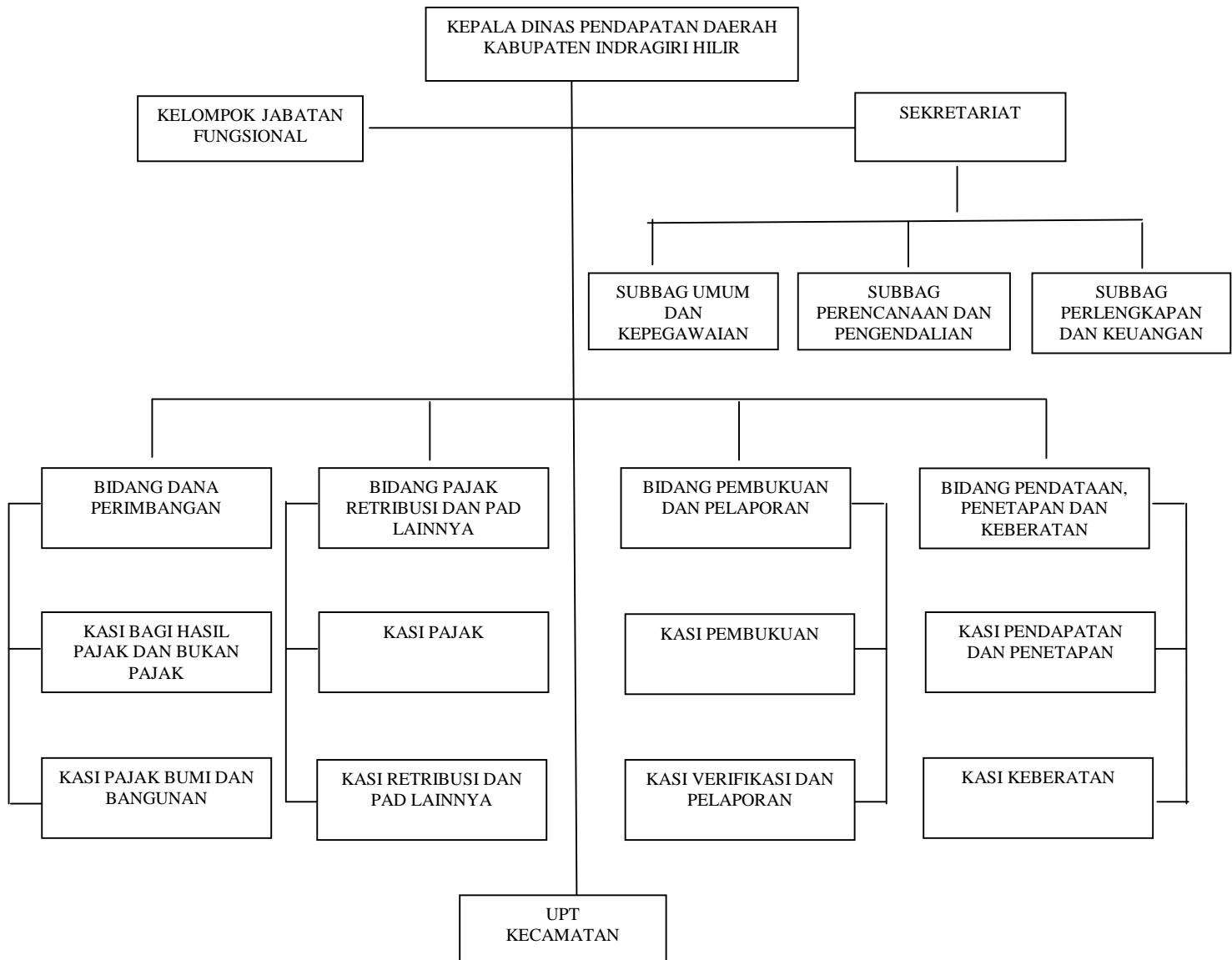
2.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Keuangan
3. Bidang Dana Perimbangan, terdiri dari:
- a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
 - b. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, terdiri dari:
- a. Seksi Pajak
 - b. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari:
- a. Seksi Pembukuan
 - b. Seksi Verifikasi dan Pelaporan
6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan, terdiri dari:
- a. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - b. Seksi Keberatan

Gambar II.1
Srtuktur Organisasi



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1. Tinjauan Teori

3.1.1. Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Adapun definisi pajak menurut beberapa ahli dibidang perpajakan antara lain :

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi Mardiasmo ini, bahwa pajak dapat disimpulkan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Sommertel Ray M (Adrian Sutedi 2011:2), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra-prestasi individual dari pemerintah .
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat “Surplus” dipergunakan untuk membiayai “Publik Investment”., sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara (budgetair).
- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

3.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulerend*) atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, misalnya : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak *regulerend* yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

3.1.3. Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Pajak Propinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. PajakParkir

3.1.4. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Herry Purwono (2010:13), cara pemungutan pajak dibagi atas 3 yaitu adalah:

1. Stelsel Riil/nyata (Riele Stelsel)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar-benar ada dan dapat ditunjuk.

Contohnya : pajak penghasilan maksud penghasilan disini adalah penghasilan sesungguhnya yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun baru diketahui pada akhir tahun sehingga pengenaan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun tersebut.

2. Stelsel Fiktif (Fictieve Stelsel)

Merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan oleh Undang-undang.

Contohnya : Penetapan besaran angsuran pajak diawal tahun yang didasarkan pada anggapan bahwa pendapatan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.

3. Stelsel Campuran

Merupakan gabungan dari 2 stelsel yang ada yaitu, stelsel riil dan stelsel fiktif.

Contohnya : pajak penghasilan

3.1.5. Sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak menggunakan tiga sistem pemungutan pajak antara lain yaitu:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

3.1.6. Pembagian Pajak

Dalam Waluyo (2009:12), pembagian pajak dikelompokkan dalam 3 kelompok diantaranya:

1. Pajak menurut golongan

a. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya: Pajak Penghasilan

a. Pajak tidak langsung

Merupakan pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai

2. Pajak menurut sifat

a. Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contohnya: Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan PPnB M

3. Pajak menurut Pemungutan dan Penggolongannya

a. Pajak Pusat

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Matrai.

b. Pajak Daerah

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3.1.7. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2008:10) asas pemungutan pajak dibagi atas 3 diantaranya:

1. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal diwilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatiksn tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3.1.8. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adi. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Yurisdis)

Dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. System pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

3.1.9. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor. 18 tahun 1997 dalam Afrizal(2009:48). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

3.1.10. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 jenis-jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi 2 kelompok diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

3.1.11. Jenis Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir

1. Pajak Hotel/restoran
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
6. Pajak Parkir

Dari pemungutan pajak diatas, merupakan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan pada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga setiap Kecamatan dan Instansi akan memberikan peranan penting dalam pemungutan pajak tersebut.

Sehingga dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Kabupaten, maka dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, daerah dituntut untuk menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.1.12. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Colloce yaitu Collocalia Fuchliap Haga, Collocalia Maxina, Collocalia Esculanta dan Collocalia Linchi.

a. Objek Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 3 adalah Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

b. Subjek Pajak Sarang Burung Walet

Subjek Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 4 adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/ atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

c. Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Wajib Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 5 adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/ atau Mengusahakan Sarang Burung Walet.

3.1.13. Dasar Hukum Pajak Sarang Burung Walet

Landasan hukum pajak sarang burung walet menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu melakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 09 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

3.1.14. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, nilai jual sarang burung walet dapat dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku dengan volume hasil sarang burung walet.

3.1.15. Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 dalam Pasal 7 yang berbunyi “ Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 7% (Tujuh Persen)” dari Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai jual sarang burung walet setiap waktu bisa saja berubah-ubah.

Rumusnya :

$$\text{Hasil Panen} \times \text{Harga Berlaku} \times 7\%$$

3.1.16. Pengertian Pajak Berdasarkan Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama **العُشْرُ** (Al-Ushr) atau **لَمْكْسُ** (Al-Maks), atau bisa juga disebut **لِضْرِيَّة** (Adh-Dharibah), yang artinya adalah ; mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan dan lain-lain. Atau dengan arti lain “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” . Atau suatu ketika bisa disebut **الْخَرَجُ** (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Sedangkan menurut ahli bahasa, pajak adalah : “ Suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum”.

Hukum pajak dan pemungutnya menurut islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum tentang pajak dapat kita lihat dalam Al.Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian,

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian (Q.S An-Nisa Ayat 29).

Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.

Kesimpulan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah bagaimana berbisnis dengan benar. Dan Perlu dipahami, bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kekayaan dengan rajinnya shalat seseorang. Apabila seseorang itu mau kaya, maka ia rajin bekerja. Dan Allah sudah menentukan ketentuannya atau sunnatullah yaitu barang siapa yang kerja dia akan dapat hasil. Adapun soal keberkahan, itu adalah dari Allah. Tapi secara dhahir kerja adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan kekayaan. Baik kafir atau mukmin kalau dia mau bekerja dengan benar, maka ia mendapatkan kekayaan.

3.2. Tinjauan Praktek

3.2.1. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Salah satu potensi yang dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Pengusahaan/Penangkaran Sarang Burung Walet. Dibawah ini dapat dilihat tabel tentang Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III.1
Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2008-2012

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2008	117.865.000,00	120.765.000,00	102,46
2	2009	228.595.000,00	231.465.000,00	101,25
3	2010	227.720.000,00	223.260.000,00	98,04
4	2011	253.835.000,00	77.300.000,00	30,45
5	2012	940.700.000,00	123.429.500,00	13,12

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak sarang burung walet pada tahun 2008 penerimaanya sangat bagus yang mana mencapai 102,46 %, dan pada tahun 2009-2012 penerimaan terhadap pajak sarang burung walet mengalami penurunan terus setiap tahunnya hingga mencapai 13,12 % pada tahun 2012, hal ini kemungkinan terjadi akibat

sistem dan prosedur pemungutan terhadap pajak sarang burung walet yang belum diketahui oleh para penangkaran burung walet tersebut.

3.2.2. Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan bisa dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan dan per 1 tahun, Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini dipungut dalam Wilayah Daerah.

Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ini ada 2 sistem yaitu Official Assesstment System dan Self Assessment System.

1. Official Assesstment System, yang mana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Dinas Pendapatan Daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memberikan penugasan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan Pembentukan Tim Pengawas Pengelolaan/pemanfaatan Sarang Burung Walet. Sehingga dari surat keputusan ini diberikan tugas kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut pajak sarang burung walet tersebut.

Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dari sistem Official Assesstment Sistem diantaranya adalah :

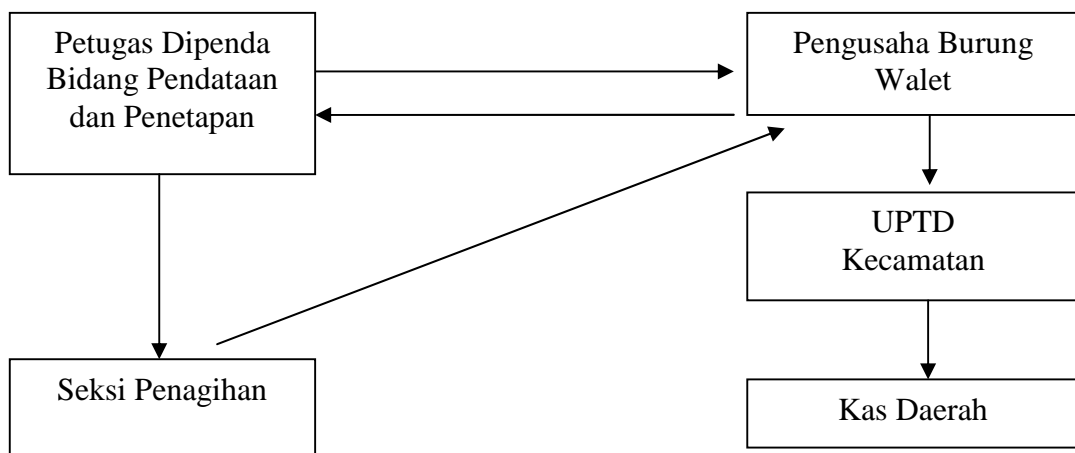
- a. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini pegawai pada Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan

pendataan terhadap hasil penjualan walet. Data hasil penjualan tersebut dikumpulkan dan diterbitkan surat ketetapan Pajak walet.

- b. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diserahkan kepada seksi penagihan dan pengendalian untuk mengumpulkan dari pengusaha walet.
- c. Setelah data pajak dikumpulkan, pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini pegawai pada bidang penagihan dan pengendalian menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada pengusaha walet.
- d. Pengusaha walet dapat menyetorkan dana ke UPTD Kecamatan dan dapat langsung membayarkan ke kas daerah.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat Diagram Alur mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet dengan menggunakan Official Assesstment Sistem dibawah ini :

Gambar III.1.
Diagram Alur Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan Official Assesstment Sistem



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

2. Self Assessment System, dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri. Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan pajak.

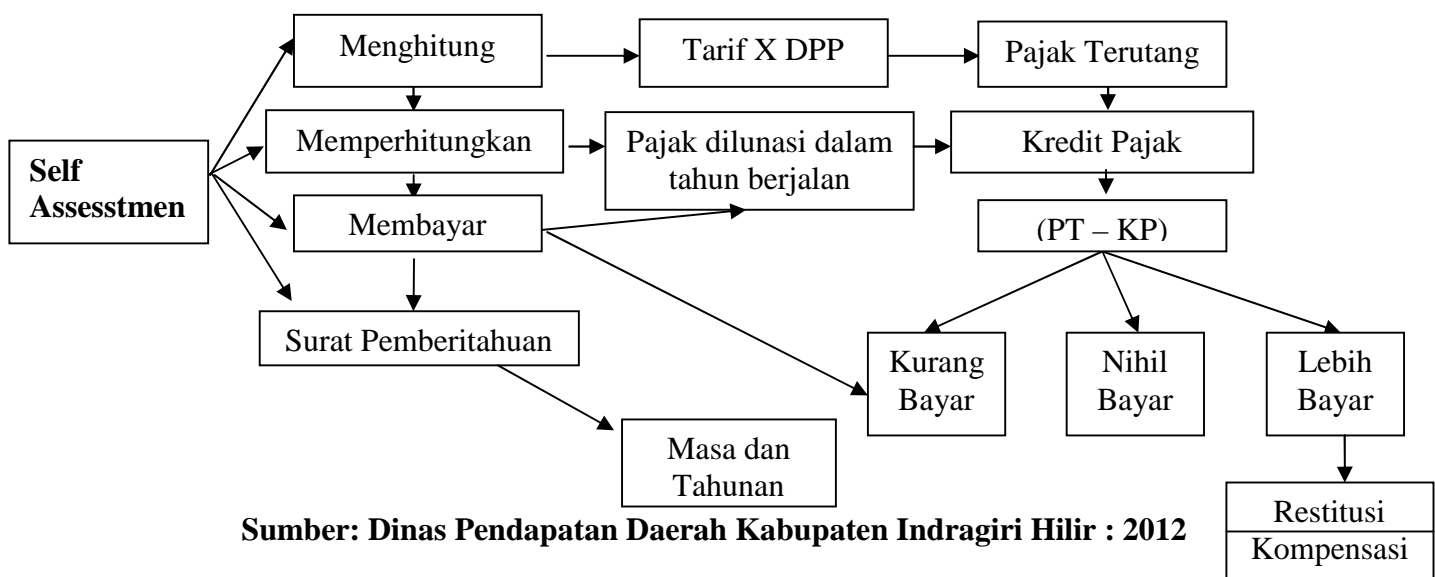
Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dari Self Assessment System diantaranya adalah :

- a. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, melapor dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- b. Dalam hal menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP) hasil tersebut merupakan pajak terutang
- c. Dari pajak terutang tersebut muncullah kredit pajak. Sehingga apabila pajak terutang dikurang kredit pajak, dan apabila pajak terutang lebih besar dari kredit pajak maka bisa muncul pajak kurang bayar, apabila pajak terutang sama dengan kredit pajak maka terjadilah pajak nihil bayar, dan apabila pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak maka hal tersebut disebut lebih bayar. Dari lebih pajak maka pajak tersebut dapat di restitusikan/di kompensasikan

d. Dalam hal membayar, pajak dapat dilunasi dalam tahun berjalan dan pajak bisa juga terjadinya kurang bayar.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat Diagram Alur mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet dibawah ini :

Gambar III.2.
Diagram Alur Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan menggunakan Self Assesstmen Sistem



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

Berdasarkan sistem pemungutan pajak diatas, hampir semua pengusaha penangkaran pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan menggunakan sistem yang ke 2 yaitu Self Assessment System, dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri dan dalam sistem ini yang mana pemerintah hanya berperan untuk mengawasi seperti misalnya: Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Dan sebahagian wajib pajak juga menggunakan sistem yang pertama yaitu Official Assessment System.

3.2.3 Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet meliputi:

1. Pendaftaran dan Pendataan;

Setiap penyelenggara Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan rencana usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah sebelum memulai usahanya. Pendaftaran yang dimaksud dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 1. Foto copy Identitas dari pemohon(KTP/SIM/Pasport)
 2. Foto copy Identitas Badan Usaha/Perusahaan/Siup/Domisili
 3. Usaha foto copy surat izin bangunan/surat keterangan proses Perizinan
 4. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan instansi berwenang.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran. Berdasarkan

keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :

1. Surat pengukuhan sebagai Wajib Sarang Burung Walet
2. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab Pajak
3. Kartu NPWPD

2. Pelaporan

Pelaporan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil kegiatan pengambilan sarang burung walet yang dilaksanakan setiap kali panen Wajib Pajak dapat membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- b. SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- c. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- d. SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak.

3. Pembayaran dan Penagihan

- a. Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dilakukan di kas daerah, atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD
- b. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah

selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

- c. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dilakukan dengan menggunakan SSPD
- d. Tata cara pengisian SPTPD dan SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

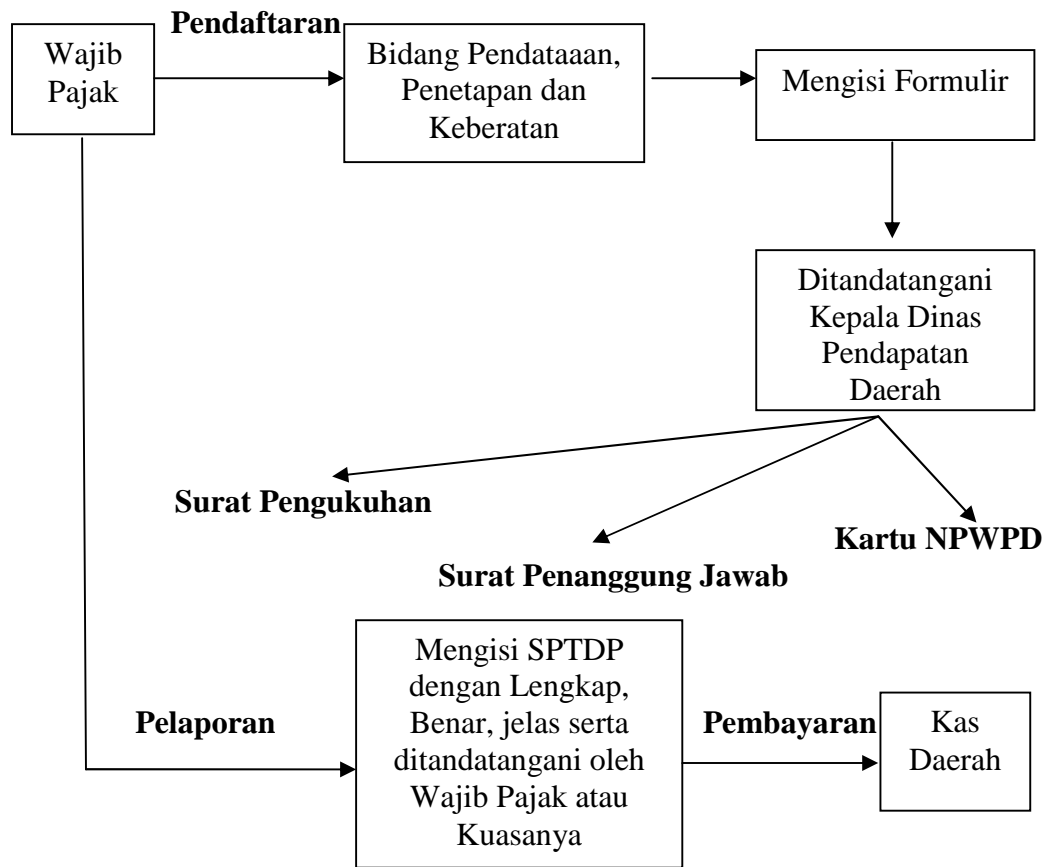
Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2010 menjelaskan :

- a. Bupati dapat menerbitkan SPTPD jika :
 - 1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
 - 2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung
 - 3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) nomor 1 dan 2 ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Gambar III.3

Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2012

3.2.4. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomo.22 Tahun 2010, dalam Pasal 11 yang mana tata cara perhitungan pajak sarang burung walet wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan Surat SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

1. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.

2. SPTPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa hukumnya.
3. Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Contoh :

Indra Putra seorang pengusaha sarang burung walet yang beralamat Jl. Sudirman Tembilahan NPWPD.R.2.001 0211 09.01 dalam 1 tahun ia memperoleh hasil panen sarang burung walet sebesar 6 Kg, pada saat itu, harga yang berlaku untuk sarang burung walet per.Kg-nya sebesar Rp.7.000.000,00-.

Ditanya: Berapakah pajak yang harus disetor Indra Putra ke Negara selama 1 tahun?

Jawaban :

Diketahui : 1 Tahun

Hasil Panen : 6 Kg

Harga Berlaku : Rp.7.000.000,00-.

Ditanya : Berapakah pajak yang harus disetor?

Jawab : = **Rumus:**

Hasil Panen x Harga Berlaku x 7%

= 6 Kg X Rp.7.000.000,00-.

= Rp.42.000.000,00- X 7%

= **Rp.2.940.000,00-**

3.2.5. Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

Dalam pembayaran pajak sarang burung walet ini, wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya melewati: UPT, Dinas Pendapatan Daerah, dan Bank. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomo.22 Tahun 2010, dalam Pasal 14 yang mana tata cara pembayaran pajak sarang burung walet yaitu:

1. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus dan lunas.
2. Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
3. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
4. Tata cara pengisian SPTPD dan SSPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

3.2.6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran apabila:

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang – kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak
 - b. Masa Pajak
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak
 - d. SKPDN
2. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, sudah memberikan keputusan.
2. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
3. Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

4. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP).
5. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

3.2.7. Ketentuan Pidana Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor.22 Tahun 2010 ketentuan pidana dapat dilakukan apabila:

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dengan tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor.22 Tahun 2010, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Colloce yaitu Collocalia Fuchliap Haga, Collocalia Maxina, Collocalia Esculanta dan Collocalia Linchi.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan bisa dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan dan per 1 tahun, sedangkan Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ini ada 2 sistem diantaranya adalah:

1. Official Assesstment System, yang mana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Dinas Pendapatan Daerah.
2. Self Assessment System, dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.

Sedangkan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet meliputi:

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Pelaporan
3. Pembayaran dan Penagihan
4. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

4.2. Saran

Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti, sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Dimana disini Kantor Dinas Pendapatan hendaknya mensosialisasikan lagi tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet. Kemudian, Dinas Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyetoran pajak oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Afrizal, *Materi Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*, Untuk Kalangan Sendiri, Pekanbaru, 2009

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Herry Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta, 2010

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2011

Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor.22 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2008

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009

<http://mkitasolo.blogspot.com/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html>